

TRANSFORMASI PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM DI PROVINSI RIAU

Fitri¹; Hernimawati²; Surya Dailaiti³; Aleksander Yandra⁴; Sudaryanto⁵

¹Tehnik Informatika Politkenik Kampar
Jln. Tengku Muhammad KM.2, Batu Belah, Kabupaten Kampar, Riau
²³⁴⁵Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : sudaryantofia@unilak.ac.id (Koresponding)

Abstract: The climate village program has been transformed into a community program for climate, thereby expanding community awareness. The problem with this program is the lack of enumerator resources, welfare and budget. Therefore, it is necessary to know where the implementation has reached using Edward III's theory. The data used is primary and secondary data, qualitative descriptive analysis. As a result, the transformation of community programs for climate has been implemented but not in all locations. This program is hampered by technological mastery, economic needs have not been met and the need for private sector involvement.

Keywords: *Transformation, Village, Community, Climate*

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia telah melakukan transformasi terkait dengan Program Kampung Iklim (proklim) yang digagas Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016. Sejak Tahun 2023, berubah menjadi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim). Perubahan ini sangat penting dan memperkuat sebagai program sebelumnya/ keberlanjutan, mengingat kampung iklim yang sudah berdiri sebelumnya perlu diwadahi dari segi kelembagaan.

Program kampung iklim adalah program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) untuk mendorong masyarakat melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proklim dilaksanakan pada tingkat terendah yakni RW (Rukun Warga) dan Dusun, tingkat tertinggi adalah kelurahan/ desa. Sedangkan Program komunitas untuk iklim adalah program untuk memperluas jangkauan dan optimalisasi peran serta seluruh pihak serta mendorong aksi adaptasi

dan mitigasi perubahan iklim menjadi gaya hidup yang berkelanjutan.

Jumlah kampung iklim Tahun 2024 sudah mencapai 10.113 dari target 20.000 lokasi, artinya sudah mencapai lebih dari 50 %. Oleh karena itu karena itu perlu keberlanjutannya, sehingga bertransformasi menjadi ProKlim. Di Provinsi Riau proklim diantaranya sudah dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk pengembangannya telah dilakukan seperti di Kabupaten Pelalawan. Pencapaian target 20.000 lokasi dapat dilakukan konsolidasi berbagai pihak/ instansi. Potensi penambahan komunitas dan lokasi tersebut adalah masyarakat peduli api, sekolah adiwiyatama, perhutani sosial, kemitraan konservasi dan masyarakat peduli gambut.

Tahun 2024, Adiwiyatama 28.700, hutan sosial 10.852, kemitraan konservasi 632, masyarakat peduli gambut 1.300 dan masyarakat peduli api 704. Totalnya 42.188 kelompok komunitas. Dari sini, bagi daerah yang sudah berhasil melaksanakan program kampung iklim (proklim) mendapatkan sertifikat pratama, madya, utama dan lestari sesuai dengan tingkatannya.

Tabel 1. Sertifikat Proklim

No	Jenis	Keterangan
1	Pratama	Melaksanakan sampai dengan 50 % kegiatan proklim
2	Madya	51-80 %
3	Utama	> 81 %
4	Lestari	Telah mendapatkan nominasi proklim utama/ pembinaan

Sumber: KLHK RI, 2024

Di Provinsi Riau penghargaan proklim tertinggi/ lestari diperoleh diantaranya oleh Dusun Sumber Makmur Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, Kampung Teluk Lancang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, Dusun Palm Agung Desa Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum belum semua di Provinsi Riau yang melaksanakan program kampung iklim, begitu pula dengan program komunitas untuk iklim.

Oleh karena itu diperlukan keterlibatan berbagai pihak guna suksesnya program yang digagas oleh KLHK RI tersebut. Pihak-pihak yang dapat terlibat diantaranya, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat.

Gambar 1. Rekonseptualisasi proklim



Sumber: KLHK RI, 2024

Tujuan dari rekonseptualisasi ini diantaranya mendorong peran aktif berbagai kelompok/ komunitas, rekognisi (pengakuan) kontribusi kelompok/ komunitas pada kawasan lintas wilayah administrasi. Kemudian rekognisi pada pembina dalam melakukan inovasi program komunitas untuk iklim. Selain itu juga rekognisi kepada pihak pendukung dalam melakukan inovasi program komunitas untuk iklim.

Wilayah kerja komunitas proklim ada 3 bagian yakni berbasis lanskap, areal kerja/ unit pengelolaan dan berbasis jenis aktifitas. Sejauh ini kontribusi proKlim terhadap

enhanced NDC 2030 (Nationally Determined Contributions (NDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca/ GRK hingga tahun 2030) sudah baik karena adanya komitmen, dukungan kebijakan dan koordinasi antar lembaga atau instansi. Saat ini tinggal lagi bagaimana merealisasikan Program Komunitas untuk Iklim benar-benar terlaksana di Provinsi Riau. Provinsi Riau sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, banyaknya perusahaan yang bergerak diberbagai bidang secara lokal, nasional hingga internasional perlu melibatkan diri dalam ProKlim.

Apalagi sertifikat ProKlim yang diraih khususnya bagi perusahaan memiliki arti penting dalam keberlanjutan usaha/ produksi, tidak hanya masyarakat secara umum. Jumlah perusahaan pada industri besar dan sedang di Provinsi Riau menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2024, tersebar di seluruh kabupaten/ kota. Lokasi terbanyak ada di Kabupaten Kampar (65) dan terendah di Kabupaten Bengkalis (15). Artinya, seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Riau memiliki peran yang besar untuk terwujudnya Program Komunitas untuk iklim. Perusahaan atau usaha industry tersebut melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa.

Dalam rangka pelaksanaan program kampung iklim maka diperlukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan. Sebab dari segi dukungan dan partisipasi masyarakat sudah baik begitu pula dengan organisasi perangkat daerah, (Ahmad et al., 2023). Masyarakat saat ini berharap bagaimana proklim juga memberikan dampak cepat terhadap kesejahteraan.

Faedlulloh et al (2019), banyak potensi yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan transformasi kepada Program Komunitas untuk Iklim. Seperti lahan kosong; rawa, ruang terbuka hijau, taman, penggunaan pupuk, pendirian bank sampah, sehingga sampah tidak menjadi musuh masyarakat tapi pendukung lingkungan dan pendapatan masyarakat, Selama pelaksanaan program kampung iklim

berjalan sudah mendapatkan pandangan yang baik dari masyarakat. Tentunya dengan perubahan menjadi program komunitas untuk iklim juga mendapat sambutan yang baik. Sebab terjadi peningkatan dengan adanya koordinasi komunikasi atau wadah bagi pelaksana program tersebut, (Nur et al., 2021).

Pemerintah daerah (kabupaten/ kota) perlu menggerakkan desa/ kelurahan, sekolah, masyarakat dan perusahaan/ pelaku usaha untuk terlibat dalam ProKlim. Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, perlu melakukan koordinasi atau mewadahnya sehingga terukur pelaksanaannya. Dengan demikian permasalahan yang terjadi saat ini bisa teratasi seperti;

1. Kurangnya sumber daya enumerator dalam melakukan registrasi proklam pada SRN-PPI (Sistem Registrasi Nasional-Pengendalian Perubahan Iklim).
2. Belum terukurnya kesejahteraan masyarakat proklam setelah dilakukan kegiatan program kampung iklim.
3. Masih kurangnya dukungan perusahaan/ pelaku usaha dalam Program Komunitas untuk Iklim

METODE

Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretative. Penelitian ini bermaksud memaknai, memahami, suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam objek yang diteliti, secara kontekstual dan menyeluruh, (Yusuf, 2014). Penelitian ini menggunakan Teori Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, (Aslinda, 2023). Ruang lingkup penelitian ini adalah Provinsi Riau Tahun 2024, dengan informan dari unsur akademisi, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, organisasi kemasyarakatan, penggiat program kampung/ komunitas untuk iklim, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, perusahaan dan

Ombudsman Riau. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

HASIL

Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) dalam melakukan transformasi program kampung iklim kepada komunitas untuk iklim merupakan langkah maju dalam menyelamatkan kehidupan. Masyarakat yang awalnya fokus kepada internalnya, maka selanjutnya adalah bagaimana membangun organisasi dan komunikasi dengan pihak lain.

Berbagai pihak mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan transformasi perubahan iklim, (Furqan et al., 2020). Proklam sebagai program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi untuk mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim berbasis tapak/administrative (KLHK RI, 2024).

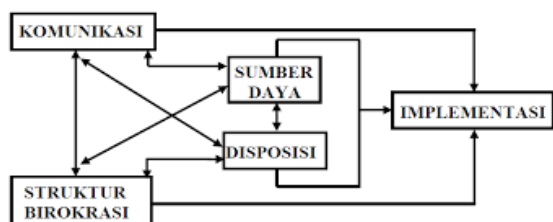
Provinsi Riau meski memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan program kampung iklim dan program komunitas untuk iklim, masih tertinggal di bandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tiga daerah di Pulau Jawa ini menjadi pengusul program kampung iklim terbanyak. Upaya Provinsi Riau untuk ikut serta bertransformasi telah digaungkan, diantaranya saat dilaksanakan Workshop “Melalui Proklam Wujudkan Kolaborasi Multi Pihak untuk Pencapaian NDC di Tingkat Tapak” Tahun 2024 yang melibatkan perguruan tinggi, KLHK (pusat dan daerah), organisasi masyarakat dan penggiat lingkungan serta perusahaan. Bahkan upaya ini mendapatkan dukungan dari lembaga internasional yakni Hanns Seidel Foundation (officer Indonesia).

PEMBAHASAN

Saat ini tinggal lagi bagaimana mewujudkan komitmen-komitmen yang telah disampaikan oleh berbagai pihak agar

transformasi program komunitas untuk iklim terlaksana dengan baik khususnya di Provinsi Riau. Secara teoritis ada ada 4 faktor pendukung yang menentukan berhasilnya transformasi program komunitas untuk iklim yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Gambar 2. Teori Edwar III



Sumber: Aslinda, 2023

Empat faktor penentu keberhasilan ini secara umum tersedia di Provinsi Riau sebagai daerah yang termasuk kaya sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu idealnya dengan berbagai potensi yang dimiliki transformasi yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik. Program Komunitas untuk Iklim, tidak hanya kepentingan pemerintah saja tapi multi pihak termasuk masyarakat, karena terdapat banyak manfaat didalamnya.

Selama kurun waktu 2020-2024, geliat program kampung iklim dan program komunitas untuk iklim sudah sangat bagus. Namun memasuki Tahun 2025, perlu lebih disiplin lagi karena terjadinya pemangkasan anggaran di berbagai bidang pemerintahan, termasuk KLHK RI yang mencapai Rp 1,5 triliun (tempo.co) dan daerah/ Riau (riauterkini.com).

Oleh karena itu Dinas LHK Provinsi Riau khususnya perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak agar program komunitas untuk iklim lebih berhasil lagi. Capaian keberlanjutan, keberhasilan program komunitas untuk iklim perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Masih banyak peluang yang perlu dimanfaatkan termasuk dari kalangan masyarakat sendiri secara swadaya membangun lingkungan atau mendorong terwujudnya program komunitas untuk iklim. Lokasi yang belum berwujud program kampung iklim perlu ditambah, kemudian yang sudah jadi perlu bertransformasi menjadi

program komunitas untuk iklim. Kondisinya, meskipun sudah berjalan, namun masih kurang sehingga perlu keterlibatan berbagai pihak agar berhasil khususnya bagi yang sudah mendapatkan pengakuan/ sertifikat.

Komunikasi

Dalam melaksanakan transformasi program komunitas untuk iklim, KLHK sebagai ujung tombak kegiatan, KLHK memiliki peran penting dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dari pusat hingga daerah (KLHK provinsi dan kabupaten/ kota), (Sudarwanto et al., 2020). Di tingkat daerah, KLHK Provinsi Riau dapat membangun komunikasi sebagaimana yang telah dilaksanakan dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pengusaha/ perusahaan, penggiat sosial/ lingkungan. Komunikasi dapat dilakukan di forum resmi seperti saat penyerahan sertifikat proklamasi, rapat, atau diluar forum resmi dengan menggunakan media cetak (koran, majalah), media elektronik (radio, televisi, internet), media sosial (Instagram, facebook).

Di lingkungan perguruan tinggi peran dosen dan mahasiswa sangat besar untuk terlibat dalam transformasi program komunitas untuk iklim. Dosen dapat melakukan edukasi (Pendidikan) tentang program tersebut kepada mahasiswa. Mahasiswa dapat melaksanakannya langsung dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau program kependulian lainnya seperti mahasiswa pencinta alam (mapala) dan berbagai komunitas lainnya yang ada di kampus dengan pemanfaatan lahan, (Sulistiyowati et al., 2024).

Gambar 3. Workshop proklamasi



Sumber: FIA UNILAK, 2024

Kebijakan menuju transformasi program komunitas untuk iklim perlu dilaksanakan setiap tahunnya dengan menjalin komunikasi berbagai pihak. Jika tidak dilakukan maka, transformasi akan berjalan ditempat. Dengan demikian diperlukan pertemuan rutin ilmiah untuk mengawal keberhasilannya.

“Kita sangat konsen pada kegiatan lingkungan, ada program Proklam, bank sampah, serta lainnya, dan ini juga bekerja sama dengan KLHK, pemerintah, perusahaan. Forum ilmiah merupakan bukti keseriusan perguruan tinggi dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan. Kita harus terus berkolaborasi dan bersinergi baik termasuk dengan ormas, seperti NU, muhammadiyah, agar penerima manfaat dan program lingkungan ini makin meluas, bermanfaat,” demikian dikatakan Jeni Wardi, Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.

Perguruan dapat melakukan pendampingan demi terwujudnya program komunitas untuk iklim. Pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk bank sampah, dengan melibatkan sekolah, pesantren, komunitas masyarakat. Sampah-sampah yang ada di sekolah dapat diberdakan dengan baik sehingga bermanfaat untuk semua, selain lingkungan menjadi lebih bersih. Peran perguruan tinggi disini dapat memberikan pendidikan (edukasi) dengan cara menjalin komunikasi antara perguruan tinggi dan sekolah tentang transformasi program komunitas untuk iklim. Jika ini diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Provinsi Riau, khususnya dimulai dari SMA sederajat, maka akan tercapai dengan baik.

Setelah beberapa tahun berjalan, program kampung iklim atau komunitas untuk iklim masih perlu disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu pendidikan dan pendampingan kepada masyarakat agar wilayah dan komunitas yang belum memahami dan mengetahui mendapatkan informasi yang lengkap sesuai dengan berbagai keuntungan yang akan diraih, (Yandra, 2023)

Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan transformasi program komunitas untuk iklim Dinas KLHK Provinsi Riau sudah memiliki struktur birokrasi yang bagus baik secara horizontal maupun vertical. Secara vertikal melakukan hubungan dengan KLHK RI dan Dinas LHK kabupaten/ kota, sedangkan horizontal dapat dilakukan dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, penggiat lingkungan dan lainnya. Hubungan horizontal di masing-masing pihak juga bisa dilanjutkan secara vertical; misalnya perguruan tinggi dengan sekolah (SMU sederajat), Dinas LHK kabupaten/ kota terhadap desa dan seterusnya.

Gambar 4. Pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat



Sumber: KLHK RI, 2024

Pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat, secara umum sudah dilakukan hanya saja terkendala dengan keberlanjutan program tersebut. Artinya, sudah ada aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sejumlah lokasi di Provinsi Riau yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama 2 tahun terakhir. Kemudian telah terbentuk kelembagaan kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan dan berjalan secara aktif. Hanya saja menghadapi tantangan dalam hal berketahanan iklim, rendah emisi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dokumentasi dan manajemen pengetahuan masih terbatas, cakupan proklam yang masih terbatas wilayah administrasi, koordinasi dan sinergi juga terbatas, pengakuan masih terbatas pada kelompok utama, pemahan Proklam juga terbatas.

Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada semua pihak; masyarakat secara umum, lingkungan pendidikan/sekolah dalam melaksanakan program kampung iklim. Pemahaman selanjutnya bertujuan kepada program komunitas untuk iklim. Pada dasarnya masyarakat umum dan lingkungan pendidikan sudah melaksanakan program tersebut namun belum memiliki wadah (naungan) yang bertanggung jawab dalam keberlanjutannya. Oleh karena itu mereka perlu dihadirkan dalam berbagai kesempatan sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih luas, (Dailaiti et al., 2024).

Selain di sekolah umum, pondok pesantren yang cenderung ramah lingkungan juga berpotensi terlibat dalam program komunitas untuk iklim. Pondok Pesantren Ibnu Al Mubarak (IBM) Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, salah satu yang mendapatkan sertifikat proklamasi (program kampung iklim). Potensi dunia pendidikan yang besar dalam program komunitas untuk iklim perlu diwujudkan karena secara struktural brikorasi sangat memadai.

Sumber Daya

Provinsi Riau memiliki sumber daya yang sangat memadai dalam mewujudkan transformasi program komunitas untuk iklim. Sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya manusia, biaya dan waktu. Dukungan anggaran tidak hanya dari pemerintah tapi juga perusahaan sehubungan dengan banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Program komunitas untuk iklim akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Hal ini seperti pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sehingga tidak terbuang dengan menimbulkan pencemaran. Hal ini pula yang mesti diterapkan di Provinsi Riau, (Fadhila et al., 2023).

Dari segi sumber daya manusia, dengan jumlah penduduk mencapai 6.642.874, telah banyak yang terlibat dalam program kampung iklim. Langkah selanjutnya adalah melibatkan mereka dalam program

komunitas untuk iklim. Sebab dari jumlah tersebut selama ini sudah ada yang beraktifitas seperti dosen dan mahasiswa, guru dan murid, pengusaha dan karyawan (perusahaan), aktivis lingkungan; Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), dan organisasi kemasyarakatan (NU, Muhammadiyah dan lainnya), bahkan dari unsur luar negeri seperti Hanns Seidel Foundation

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau

No	Tahun	Jumlah (Rp)	
		Pendapatan	Belanja
1	2021	9.915.693.985.414	8.931.735.136.291
2	2022	8.818.669.764.115	9.102.467.422.821
3	2023	10.007.464.659.029	10.515.653.053.903

Sumber: BPS Riau, 2025

Jumlah anggaran yang besar tersebut belum termasuk dengan anggaran yang ada di kabupaten/ kota. Artinya, jika pemerintah kabupaten/ kota juga dan provinsi serta perusahaan bersinergi dalam melaksanakan transformasi program komunitas untuk iklim tentunya, tidak ada kendala dari segi pendanaan, (Ramdani, 2021).

Dari segi waktu, ditargetkan terbentuknya 20.000 proklamasi Tahun 2024. Pada Festival LIKE 2 (Lingkungan-Iklim-Ketahanan-Energi), pemerintah menyatakan sudah tercapai lebih dari 10.113. Artinya walaupun tahun terus berjalan, namun kerja belum selesai.

Disposisi

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau telah melaksanakan program kampung iklim dengan melibatkan Dinas LHK kabupaten/ kota. Dinas LHK kabupaten/ kota diminta untuk terlibat dalam mewujudkan program tersebut, tidak hanya menyerahkan kepada masyarakat saja. Artinya keberhasilan program penghargaan/ sertifikat yang diraih tidak lepas dari peran Dinas LHK kabupaten/ kota. Bahkan untuk memperkuat hal tersebut dalam setiap pertemuan proklamasi senantiasa melibatkan Dinas LHK kabupaten/ kota.

“Transformasi program kampung iklim kepada program komunitas untuk iklim juga ditentukan oleh kebijakan Dinas LHK di daerah. Arahannya memang untuk semua, realisasi, tentu sesuai kesanggupan. Kami misalnya di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar, membentuk Kelompok Tani & Kolam Ikan Patin; Harapan Baru. Kita masih mengharapkan ada dukungan dari semua pihak,” demikian dikatakan Candra Budi, Penggiat program komunitas untuk iklim.

Bentuk program komunitas untuk iklim yang dilakukan di Desa Koto Mesjid adalah dengan menanam padi di kolam ikan. Hasilnya, sudah sangat bagus, menggunakan pupuk keong yang ada dalam kolam melalui fermentasi. Hasilnya padi sudah berbuah dan sangat besar memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kegiatan lainnya adalah;

1. Pembibitan aren
2. Menanam lahan kosong
3. Pengolahan sambuk kelapa untuk pupuk dan media tanam

Gambar 5. Sawah di Areal Kolam Ikan



Sumber: Candra Budi, 2025

Pertemuan komunitas untuk iklim minimal 1 kali per bulan, kegiatan lainnya adalah pelatihan aren berkelanjutan, pengolahan sampah organik eko enzim dan pupuk. Berkebun aren menggunakan dana pusat untuk kurun waktu 2 tahun di areal seluas 10 hektar. Di areal tersebut dibuat pernyataan tidak boleh diperjual belikan lahannya. Kegiatan ini melibatkan 4 kelompok baru dan dibagi per zona komunitas untuk iklim. Dengan demikian selain pertemuan, komunitas juga melakukan cocok tanam memakai pupuk alami bukan kimia;

yang hasilnya sama antara boster dengan pupuk keong.

Hal yang perlu diperkuat dalam program komunitas untuk iklim ini adalah pengarahan, karena dari Dinas LHK Provinsi Riau, walaupun untuk semua namun belum terlaksana semua. Berlaku bagi yang siap/ tidak seluruh anggota dan terkendala dana. Untuk di Kabupaten Kampar, beberapa desa sudah membentuk komunitas yakni Desa Silam, Desa Pulau Gadang dan Desa Koto Mesjid. Kegiatan yang telah dilakukan yakni; pelatihan tentang aren dan pengolahan sampah jadi eko enzim dan aneka turun aren.

Implementasi program kampung iklim sebagai dasar program komunitas untuk iklim harus dilaksanakan. Beberapa program kerja yang dapat dilakukan adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim itu sendiri sesuai dengan kondisi wilayah seperti persapan air, penanaman vegetasi, (Susanti et al., 2022).

SIMPULAN

Transformasi program kampung iklim menjadi program komunitas untuk iklim belum berjalan di seluruh lokasi. Transformasi ini sangat baik dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini terkendala dengan penguatan antar lokasi, teknologi dan dana.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, S. N. A., Latipah, S., & Oktaviani, I. (2023). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kampung Iklim Di Wilayah Kota Tangerang. *Pembangunan Kota Tangerang*, 1(2), 161–183.
- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik Dan Teori Perubahan Kebijakan*. K Media.
- Dailiati, S., Hernimawati, Sudaryanto, & Kurniady, E. (2024). Potensi Program Kampung Iklim Di SMA Negeri 4 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Diklat Review*, 8(1), 23–27.

- Fadhila, E., Yuswarni, Firdaus, A., Yandra, A., & Arizal. (2023). Implementation of batik wastewater management policy: A case study of Pekalongan city. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 13(2), 825–834.
- Faedlulloh, D., Irawan, B., & Prasetyanti, R. (2019). Program Unggulan Kampung Iklim (Proklim) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *JIAIP*, 4(1), 28–44.
- Furqan, M. H., Azis, D., & Wahyuni, R. (2020). Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Geosfe*, 5(2), 42–49.
- Nur, A. Z. O., Muryani, C., Noviani, R., & Ajar, S. B. (2021). Persepsi Masyarakat Pada Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. In R. Novianti, Y. Yusuf, & M. Salimi (Eds.), *Seminar Nasional “Kebijakan Satu Peta dan Implementasinya untuk Perencanaan Wilayah (DAS) dan Mitigasi Bencana”* (pp. 61–67). Geo Spatial Proceeding.
- Ramdani, J. (2021). Kolaborasi Multi Pihak Pada Program Kampung Iklim Di Kabupaten Cilacap. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 191–198.
- Sudarwanto, Tjoneng, A., & Suriyanti. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *Agrotek*, 4(2), 52–64.
- Sulistiyowati, H., Hasanah, E. A., Ratnasari, T., Dewi, N., Siddiq, A. M., Kurnianto, A. S., Yulianto, R., & Widodo, N. (2024). Pengembangan Proklim Melalui Pemanfaatan Pekarangan Berkelanjutan Di Desa Binaan Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. *Reswara*, 5(2), 671–680.
- Susanti, A. A., Antika, A. A., Pratama, R., Pradana, F. G., Handayani, S., & Sutaryono. (2022). Implementasi dan Pengembangan Program Unggulan Kampung Iklim (Proklim) di Desa Kertonatan. *Buletin KKN Pendidikan*, 4(1), 58–68.
- Yandra, A. (2023). ProKlim: Institutional Data Inventory Assistance at Site Level. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 278–286.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian; Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media Grup.